

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap pemikiran yang mencoba bergulat dengan persoalan pembangunan akan selalu menghadapi suatu kesulitan tetap, yaitu pilihan untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi atau memberikan jaminan bagi kebebasan politik dan hak-hak sipil. Manakah yang harus didahulukan, pertumbuhan ekonomi atau kebebasan (demokrasi)? Apakah kebebasan (tuntutan demokratisasi) harus ditunda hingga suatu negara mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat? Sejauh mana peran kebebasan dalam pembangunan secara keseluruhan? Apakah tuntutan kebebasan dan hak asasi manusia harus diletakkan sejak awal atau di akhir proses pembangunan? Sistem pemerintahan mana yang lebih efektif melangsungkan pembangunan, sistem pemerintahan diktator atau pemerintahan yang demokratis?

Dalam perdebatan yang kontroversial tentang peranan nilai-nilai Asia akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an, para diktator pembangunan di Asia menjawab pertanyaan tersebut dengan lugas bahwa tuntutan kebebasan atau demokrasi tidak relevan dalam pembangunan ekonomi. Dalam perdebatan tersebut Lee Kuan Yew (Singapura), Mahathir bin Mohamad (Malaysia), Soeharto (Indonesia) dengan lantang memperkenalkan sistem politik mereka yang otoriter sebagai "Poros-Asia" sambil menegaskan bahwa tuntutan kebebasan dalam konteks Asia merupakan sesuatu yang kontraproduktif; karena pembangunan ekonomi tidak dapat dijalankan bersamaan dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia; pertumbuhan demokrasi akan dengan

sendirinya muncul jika pertumbuhan ekonomi mencapai tahapan yang memungkinkan terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat banyak.¹

Merujuk pada kemajuan dan prestasi ekonomi di beberapa negara Asia seperti Jepang, Hongkong, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan, para diktator pembangunan berpandangan bahwa nilai-nilai Asia seperti nilai kebersamaan dan bukan tuntutan hak individual, nilai harmoni dan bukan konflik terbuka, sikap hormat pada atasan atau penguasa dan bukan kebebasan berpendapat merupakan kunci kemajuan pembangunan di beberapa negara macam Asia.² Dari fakta kecocokan antara nilai-nilai Asia dan pembangunan para diktator pembangunan di Asia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijalankan bersamaan dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Fakta kemajuan ekonomi beberapa negara di Asia Timur, yang tidak terlepas dari faktor budaya Asia, menunjukkan bahwa sistem politik otoriter juga bisa mendongkrak prestasi ekonomi. Para diktator pembangunan di Asia berkesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih berkaitan langsung dengan kehidupan manusia secara langsung, sedangkan kebebasan politik merupakan kebutuhan yang baru bisa dipenuhi setelah kebutuhan ekonomi tercapai.³

Selain itu penolakan terhadap tuntutan kebebasan (demokrasi) dalam pembangunan berasal dari Lee Kyuan Yew dan Soeharto. Dikatakan bahwa demokrasi, hak-hak asasi manusia atau kebebasan adalah produk peradaban Barat, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran yang menekankan harmoni daripada kebebasan politik. Argumentasi ini diberikan oleh Lee Kyuan Yew dan Soeharto dalam menanggapi argumentasi internasional yang menyerukan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam proses pembangunan. Selanjutnya dikatakan bahwa tindakan oposisi yang merupakan bagian dari demokrasi dinilai tidak cocok untuk diterapkan dalam format politik Asia. Argumentasi inilah yang melatarbelakangi tindakan represif terhadap figur-figur yang merupakan simbol perlawanan terhadap para diktator pembangunan seperti

¹ Lihat dalam: Leena Avonius dan Damian pengantar Kingsbury, *Human Rights in Asia: A Reassessment of The Asian Values Debate* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 1-17.

² *Ibid*; Lihat juga Wolfgang S. Heinz "Mitos Nilai-Nilai Asia", dalam Frans Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Ledalero, 2006), hlm. 173.

³ Bdk. Jack Donnelly "Hak Asasi Manusia Nilai-Nilai Asia" dalam Frans Cuefin, *Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Ledalero, 2006), hlm. 145.

yang pernah dialami Benigno Aquino, Aung San Suu Kyi, Wei Jhin Sheng, dan Marthin Lee. Mereka dijeblos ke dalam penjara karena dinilai menyuarakan perjuangan demokrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Asia.⁴

Tuntutan kebebasan atau demokratisasi yang ditentang oleh para diktator pembangunan di Asia seperti Lee Kuan Yew, M. Mahatir dan Soeharto, bukan saja dilancarkan oleh pihak Barat, melainkan oleh gelombang kesadaran sebagian besar warga atau rakyat Asia sendiri. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa yang bergabung dengan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut demokratisasi, dengan suatu kesadaran bahwa demokrasi dan hak asasi manusia bukanlah semata-mata monopoli Barat, tetapi harus menjadi prasyarat bagi pembangunan yang manusiawi.⁵

Khususnya di Indonesia, rezim Soeharto menciptakan suatu format politik yang memberikan penekanan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dengan risiko bahwa tuntutan kebebasan dipandang tidak relevan dalam konteks pembangunan ekonomi. Dengan rumusan lain, politik pembangunan rezim Orde Baru ditopang oleh ideologi yang memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi yang diukur sebagai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, bukannya kebebasan politik dan hak asasi manusia.⁶ Penindasan terhadap aktivitas politik dipertahankan melalui doktrin "massa mengambang" yang diperkenalkan pada 1971. Menurut prinsip ini, aktivitas politik pada tingkat masyarakat dilarang. Penduduk harus menjadi "massa mengambang" karena dipaksa untuk lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan tidak boleh tergoda untuk menuntut kebebasan politik. Orde Baru menganut semboyan, *kebebasan politik, no, pembangunan ekonomi, yes.*⁷

Sosiolog Peter L. Berger memberikan kritik tajam terhadap paradigma pertumbuhan sebagai sebuah mitos, karena paradigma pertumbuhan ekonomi beroperasi di atas ketidakpastian, untuk siapa pertumbuhan kue nasional

⁴ Greg Sheridan, *Asian Values Western Dreams: Understanding The New Asia* (Australia: National Library of Australia, 1999), hlm. 11.

⁵ Kejatuhan Soeharto 1998 misalnya merupakan buah dari gerakan dan kesadaran rakyat yang melihat sistem politik non-demokratis sebagai biang keterpurukan ekonomi Indonesia sejak krisis multidimensi 1997.

⁶ Mahesti Hasanah. "Kontestasi Nilai-Nilai Asia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991-1999." *Jurnal PolGov*, 1:2 (Yogyakarta: 2019): 299-328, Url: <https://journal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/5045/1760> (akses 20 Mei 2024), hlm. 313.

⁷ *Ibid.*

diprioritaskan. Pertumbuhan ekonomi tidak mengatakan apa pun tentang pembagian pendapatan real. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk dan pada kenyataannya tidak meningkatkan kualitas hidup mereka. Menurut Peter L. Berger, kelemahan mendasar mitos pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme terletak dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang menyetujui penderitaan pada waktu sekarang demi janji kemakmuran di masa depan. Demi janji kesejahteraan generasi masa depan, penderitaan manusia generasi sekarang ini dalam segala bentuknya dibenarkan.⁸

Berlawanan dengan pendirian diktator pembangunan di Asia yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kebebasan politik (demokrasi) dan hak asasi manusia, beberapa cendekiawan Asia tampil dengan argumen bahwa demokrasi bukan barang mewah yang menunggu datangnya kemakmuran, dan hanya terdapat sedikit bukti di mana orang-orang miskin yang akan menolak demokrasi jika mereka diberikan suatu pilihan. Amartya Sen misalnya berpandangan bahwa demokrasi memberikan kepada seorang individu lebih banyak kebebasan dan menjaminkannya untuk menikmati kebebasannya tanpa halangan. Jaminan ini diberikan oleh hak-hak politik dan hak-hak sipil seorang individu demi perkembangan yang wajar dan matang seorang individu.⁹ Dalam pandangan Sen, pembangunan mesti dipahami sebagai ikhtiar pengurangan ketidakbebasan, yang menghambat pelbagai kemungkinan tindakan dan pilihan manusia. Pengurangan ketidakbebasan ini tidak dapat ditempuh melalui peningkatan pendapatan. Yang mutlak dilakukan adalah terbukanya akses bagi kaum miskin pada jaminan sosial dasar seperti sekolah dan pelayanan kesehatan dan juga hak-hak dasar warga negara sebagai prasyarat bagi partisipasi dalam proses sosial. Perluasan kebebasan dalam pelbagai dimensi ekonomi, sosial, dan politik merupakan tujuan utama dan sekaligus sarana penting bagi pembangunan. Lebih jauh, Amartya Sen menggarisbawahi bahwa ide demokrasi bukanlah barang import dari pihak asing (Barat); ide itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Asia,

⁸ Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial*, penerj. Rahman Tolleng (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 173.

⁹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 2000), hlm. 38.

karena dia telah berakar dalam tradisi Asia, karena itu dia harus diterima sebagai nilai universal.¹⁰

Di Indonesia, cendekiawan seperti Soedjatmoko melahirkan pemikiran yang tak berbeda jauh dari pemikiran Amartya Sen, di mana Soedjatmoko menjadikan otonomi dan kebebasan sebagai titik pangkal dan titik tujuan untuk mempersoalkan banyak hal termasuk pembangunan, tradisi dan agama. Pemikiran kedua tokoh ini merupakan respons kritis terhadap kondisi di mana nilai kebebasan mendapat ancaman dari pelbagai penjuru, baik dari ideologi politik, praksis politik otoriter atau pun penghayatan hidup keagamaan dan kebudayaan yang menindas kebebasan. Berbeda dengan Amartya Sen yang berminat pada usaha membangun suatu sistem pemikiran yang disusun dalam bentuk buku, Soedjatmoko tidak berminat sedikit pun pada usaha “membangun suatu sistem pemikiran” melainkan pada “kesungguhan menghadapi persoalan”.¹¹ Dan persoalan yang menjadi keprihatinan Soedjatmoko adalah sejauh mana pembangunan merupakan bagian dari usaha mempertahankan dan menyelamatkan otonomi dan kebebasan manusia atau justru mematikan dan memusnahkannya. Tampak jelas di sini bahwa pemikiran Soedjatmoko tidak bertolak dari suatu masalah epistemologis, melainkan bertolak dari desakan realitas pengalaman bahwa otonomi dan kebebasan manusia sedang mengalami ancaman, baik yang datang dari pelbagai ideologi, model pembangunan atau pun sistem pemerintahan yang otoriter serta penghayatan keagamaan yang intoleran. Jika benar bahwa keseluruhan pemikiran Soedjatmoko memperlihatkan keseriusannya menyikapi persoalan yang dihadapi manusia, maka dalam konteks pemikirannya itu, otonomi lebih merupakan *etik* dan bukan *episteme*.¹²

Soedjatmoko adalah sosok intelektual besar yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam perubahan dari masa pra-kemerdekaan ke masa pasca kemerdekaan, dari periode Orde Lama hingga Orde Baru. Salah satu gagasan yang membuat Soedjatmoko dikenal luas adalah pemikirannya tentang bagaimana

¹⁰ Amartya Sen “Democracy As A Universal Value”, dalam *Journal Of Democracy*, 10:3 (Cambridge: 1999), hlm. 3-17.

¹¹ Ignas Kleden, “Soedjatmoko: sebuah Psikologi Pembebasan”, dalam Soedjatmoko, *Etika Pembebasan-Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. ix.

¹² *Ibid.*, xLii.

melindungi atau menyelamatkan otonomi dan kebebasan manusia. Dalam pandangannya, manusia konkret dan segala penderitaannya merupakan pangkal dan tujuan pembangunan. Seluruh pemikirannya berkutat pada pertanyaan, sejauh mana pembangunan, kebudayaan dan agama merupakan bagian dari usaha mempertahankan dan menyelamatkan otonomi dan kebebasan manusia atau justru mematikan dan memusnahkan otonomi dan kebebasan.¹³

Jika benar bahwa pemikiran Soedjatmoko bertitik tolak dari realitas ketidakbebasan sebagai pengalaman nyata manusia, maka terlihat jelas di sini pendekatan yang ditempuh oleh Soedjatmoko, yaitu pendekatan negatif, suatu pendekatan yang melihat sejarah dari kaca mata para korban. Hal itu berarti bahwa kegiatan pembangunan (dalam bidang ekonomi dan politik) tidak bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara *apriori* (pertumbuhan ekonomi) – karena tidak jelas siapa yang diprioritaskan – melainkan bertitik tolak dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan karena itu tidak bisa diterima begitu saja. Peniadaan ketidakbebasan sebagai bentuk penderitaan manusia harus menjadi tolok ukur untuk menilai kegiatan ekonomi, sosio-budaya dan politik.¹⁴ Pengalaman derita membuka cakrawala cita-cita dan nilai-nilai yang memberi arah pada tindakan langkah konkret, sekalipun bukan dalam perumusan positif dan terperinci. Jadi, ketidakbebasan sebagai bentuk penderitaan manusia menjadi pusat keprihatinan Soedjatmoko. Jika ia dengan tegas menjadikan kebebasan sebagai pangkal dan tujuan pembangunan, itu disebabkan karena ide, motif atau pun intensi dasar yang mendorong praksis kebebasan nyata dan hak-hak asasi manusia adalah 'tuntutan universal' untuk melindungi manusia dari pengalaman-pengalaman ketidakbebasan sebagai bentuk penderitaan.¹⁵ Keistimewaan dari pendekatan negatif ini terletak dalam imperatif bahwa dalam pengalaman derita akibat pengekangan kebebasan tampak secara dialektis apa yang hendak dituju atau diupayakan.¹⁶

¹³ Aswab Mahasin, "Soedjatmoko dan Dimensi Manusia: Sekapur Sirih", dalam Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan* (Jakarta: PT Pusataka LP3ES, 1983), hal. ix

¹⁴ Bdk. Johannes Müller, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 162.

¹⁵ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁶ Bdk. Johannes Müller, *op. cit.*, hlm. 161.

Dengan menempatkan manusia konkret sebagai pangkal sekaligus tujuan pembangunan, pemikiran Soedjadmoko menyingkapkan suatu pilihan yang mendahulukan orang yang menderita ketidakbebasan. Dalam seluruh tulisannya terlihat perjuangan Soedjatmoko untuk melindungi manusia dari setiap ancaman yang memusnahkan kebebasan. Dengan menempatkan manusia sebagai pangkal dan tujuan pembangunan, maka partisipasi kognitif manusia dalam setiap pengambilan keputusan politik merupakan suatu keharusan. Dalam pandangannya, orang yang sangat kaya yang dicegah untuk berbicara secara bebas, atau untuk berpartisipasi dalam debat atau keputusan publik, telah tercabut dari sesuatu yang dia percaya untuk dihargai. Proses pembangunan, ketika dinilai dengan peningkatan kebebasan manusia, harus mencakup penghapusan terhadap setiap bentuk peniadaan seperti ini. Bahkan ketika orang tersebut tidak mempunyai kepentingan mendesak untuk menggunakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi, hal tersebut tetaplah sebuah pencabutan dari kebebasan, jika dia dibiarkan tidak mempunyai pilihan terhadap masalah ini. Pembangunan yang dilihat sebagai peningkatan kebebasan harus memperhatikan bentuk-bentuk peniadaan kebebasan seperti itu. Dengan rumusan lain, pembangunan dalam pandangan Soedjatmoko merupakan langkah politik untuk meniadakan ketidakbebasan sebagai bentuk penderitaan manusia konkret.¹⁷ Dalam konteks ini kegiatan politik atau ekonomi tidak mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan berkarakter instrumental yaitu sarana untuk membebaskan manusia dari penderitaan dalam pelbagai dimensi dan bentuknya. Kemajuan ekonomi merupakan sesuatu yang penting, namun bukan prasyarat yang memadai bagi upaya mewujudkan keadilan global, perlindungan alam dan kebhinekaan budaya.

Pemikiran Soedjatmoko juga mencakup masalah kontribusi agama-agama dalam pembangunan. Jika ketidakbebasan sebagai pengalaman derita menyajikan tolok ukur untuk menilai proses ekonomi dan politik, maka atas cara yang sama dapat dikatakan juga bahwa derita manusia menyajikan tolok ukur untuk menilai dampak kehadiran agama-agama.¹⁸ Hal ini perlu disadari karena agama dan kebudayaan bercorak ambivalen: agama-agama dan kebudayaan bisa menjadi sumber ketidakadilan, intoleransi, kekerasan, terorisme, sekaligus bisa menjadi

¹⁷ Soedjatmoko, *loc. cit.*

¹⁸ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, op.cit.*, hlm. 55-229.

sumber perdamaian, pendukung ide keadilan dan hak asasi manusia. Patut didiskusikan sejauh mana agama-agama dan tradisi budaya bisa menjadi bagian dari usaha meniadakan derita manusia, atau justru menghambat usaha-usaha seperti itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Ignas Kleden,¹⁹ kontribusi nyata agama-agama dalam pembangunan terletak dalam kemampuan agama-agama untuk melakukan kalkulasi biaya manusia dalam pembangunan.

Di bawah judul: **PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN: TELAAH ATAS PANDANGAN SOEDJATMOKO MENGENAI PEMBANGUNAN**, penulis terdorong untuk merefleksikan kembali relevansi pemikiran Soedjamoko bagi pemahaman yang realistis tentang pembangunan. Jika sejauh ini pembangunan dipahami dan disamakan dengan pembangunan ekonomi, maka pemikiran Soedjatmoko bertitik-tolak dari pertanyaan, sejauh mana ketidakbebasan sebagai pengalaman nyata manusia bisa menjadi landasan bagi suatu etika politik pembangunan yang bercorak universal.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, masalah pokok karya tulis ini adalah: sejauh mana pemikiran Soedjamoko berkontribusi dalam usaha memberikan landasan bagi suatu pemahaman yang realistis tentang pembangunan? Dari masalah utama ini, akan digumuli berturut-turut masalah turunan seperti pertama, siapakah Soedjatmoko dan bagaimana responsnya terhadap realitas sosio-politik yang berpotensi mengancam otonomi dan kebebasan? Kedua, sejauh mana ketidakbebasan sebagai pengalaman nyata manusia bisa menjadi landasan bagi suatu etika politik pembangunan yang bercorak universal?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah beserta rumusan masalah di atas, tulisan ini hendak memburu tujuan utama, yaitu sejauh mana pemikiran Soedjatmoko berkontribusi dalam usaha memberikan landasan bagi suatu pemahaman yang realistis tentang pembangunan. Sedangkan tujuan khusus tulisan ini terletak dalam usaha memenuhi salah satu tuntutan akademis dari pada Institut

¹⁹ Ignas Kleden, *op.cit.*, hlm. xL.

Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) bidang Filsafat.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang telah digagas di atas, maka dibutuhkan sebuah metode penulisan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif -kualitatif dengan strategi studi kepustakaan. Penulis melakukan kajian literatur baik artikel-artikel yang ditulis oleh Soedjatmoko, maupun tulisan-tulisan tentang pemikiran Soedjatmoko. Penulis juga menggunakan sumber-sumber lain dari Indonesia maupun sumber asing non-Indonesia dalam upaya mendalami masalah pembangunan yang cukup pelik terutama di negara ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan. Dalam bagian latar belakang penulisan, penulis menguraikan persoalan pembangunan dalam dunia ketiga yang banyak sekali mengalami permasalahan. Pembangunan dunia ketiga ini termasuk juga Negara Indonesia secara khusus permasalahan pada masa Orde Baru. Penulis menggunakan pandangan Soedjatmoko dalam meneropong ancaman-ancaman bagi pembangunan. Selain itu, pada bagian ini terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II dijelaskan mengenai biografi dari Soedjatmoko. Latar belakang pemikiran Soedjatmoko dalam melahirkan pemikiran mengenai pembangunan serta berbagai pengaruh yang mempengaruhi lahirnya pikirannya tentang pembangunan juga dibahas dalam bagian bab ini.

Dalam Bab III diuraikan mengenai kaitan erat antara kebebasan dan pembangunan dalam pandangan Soedjatmoko. Pemikiran Soedjatmoko mengenai hal ini merupakan respons kritisnya terhadap pemahaman mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Soedjatmoko, pembangunan mesti dipahami sebagai upaya menyelamatkan otonomi dan kebebasan, di mana manusia konkret dengan pelbagai deritanya menjadi pangkal dan sekaligus tujuan pembangunan.

Dalam Bab IV dijelaskan tentang pendekatan Soedjatmoko yang melihat sejarah dari kaca mata korban. Di bawah judul pembangunan sebagai peniadaan

ketidakbebasan, penulis menjelaskan secara gamblang dalam bab ini mengenai realitas sosio-politik yang menjadi ancaman bagi otonomi dan kebebasan. Dalam bab ini dijelaskan sejauh mana ketidakbebasan sebagai pengalaman nyata bisa menjadi landasan bagi suatu etika politik pembangunan yang bercorak universal. Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai usaha membebaskan manusia dari penderitaan. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan. Akhirnya dalam Bab V dijelaskan beberapa kesimpulan penting dari keseluruhan tulisan ini, dan juga saran dari penulis bagi pembaca berkaitan dengan pokok tulisan ini.